

Prabowo Antara Kapitalisme Negara Dengan Kapitalisme Pasar

Ahmada Efendi, Ali Dachlan Center

Jln Dr. Soetomo No. 19 Karang Baru Mataram

Prabowo dikatakan sebagai presiden yang telah mengembalikan Negara dari kapitalisme pasar menjadi kapitalisme Negara. Isu yang beredar adalah banyak kaum oligarki digulung. Lalu asset-assetnya disita kemudian di masukkan sebagai kekayaan Negara. Kasus ribuan hektar lahan sawit yang disita dengan membayar denda sekaligus merupakan contoh terbarunya.

Masyarakat tentu masih ingat ketika media banyak menyangkan uang sitaan sampai setinggi meteran dan lebar puluhan meter merupakan uang denda dari oligarki sawit illegal. Jika tidak ada denda maka akan berakibat pidana. Sementara lahan-lahan sawit illegal dipegang langsung oleh Negara. Itulah mengapa ada PT Agrinas Palma Nusantara, Perminas maupun Koperasi Desa Merah Putih.

Dari langkah-langkah Pak Prabowo terdahulu kelihatan sekali bagaimana ia hendak mencoba merombak struktur ekonomi-politik dari paradigma kapitalisme pasar menjadi kapitalisme negara. Apa itu kapitalisme pasar? System ekonomi yang dikuasai oleh swasta sebagai kepemilikan dominan, berorientasi pada keuntungan perusahaan, efisiensi dan berkompetisi bebas berdasarkan dinamika pasar. Sedangkan kapitalisme negara system ekonomi di mana Negara sebagai pemainnya, negara yang mengatur siapa saja pengelolanya dan lain sebagainya.

Jikalau mau diperhatikan lebih jauh, bahwa antara kapitalisme Negara dengan kapitalisme pasar merupakan dua entitas yang terus berseteru. Dahulu ketika era Orde Baru state capitalism (kapitalisme pasar) lebih menonjol dengan Soeharto sebagai presidennya. Lalu ketika reformasi 1997/98 IMF, Bank Dunia dan lembaga-lembaga donor internasional lainnya merombak state capitalism Soeharto. Bagaimana pun syarat untuk IMF dan Bank Dunia mau membantu memberikan hutang untuk pemulihan krisis adalah dengan merima syarat-syarat yang disebut dengan Washington consensus di mana point-point pentingnya adalah melepaskan perusahaan-perusahaan Negara (BUMN) untuk dikuasai oleh investasi luar (asing).

Oleh karena krisis 1997/98 terdahulu ketika Soeharto jatuh maka masyarakat Indonesia mulai sering mendengar istilah liberalisasi, privatisasi atau pun system ekonomi neoliberal. Semua itu merujuk pada suastanisasi perusahaan-perusahaan BUMN agar dapat dimasuki dan dikuasai investasi asing. Pada model ini lebih mendorong BUMN-BUMN untuk terkoneksi dengan permainan pasar. Ada istilah invisible hand di mana usaha-usaha sepenuhnya tunduk terhadap permainan pasar.

Konsekuensi adalah bagaimana agar semua perusahaan didorong untuk melakukan kerja –kerja profesional, mendorong terjadinya efisiensi pasar agar hasilnya berupa kemampuan bersaing yang optimal. Kata kunci dari tuntutan pasar adalah bersaing. Semakin mampu sebuah usaha bersaing maka akan semakin baik. Itulah paradigm moral dari perusahaan-perusahaan swasta didalam melakukan kerja-kerja bagi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Dengan demikian para personalia perusahaan terdiri dari orang-orang dengan etos kerja yang tinggi. Profesionalisme sangat diapresiasi. Lalu ketika hendak di bawa dalam suasana pengelolaan berbeda dengan Negara sebagai tuannya maka nuansa nya akan berubah. Di sini penguasa sebagai bosnya. Kesetiaan yang tadi dibangun bagi mendapatkan efisiensi pasar kini berubah pada kesetiaan pada penguasa dengan segala birokrasinya dan partai-partai pendukungnya.

Penempatan berbagai personalia yang tadinya biasa berasal dari profesional dengan etos kerja yang tinggi kini diubah menjadi berbasis kekuasaan dengan instrument partai-partai yang bergabung di dalamnya. Persoalan ini kemudian direspon pasar sebagai hal yang tidak ramah, sehingga dapat menyebabkan distrust. Dengan demikian jaringan pasar yang tadi bekerja dengan baik perlahan surut.

Itu pula yang terjadi ketika Hugo Chavez di Venezuela menasionalisasi perusahaan minyaknya. Ketika dipegang oleh perusahaan swasta dengan kemampuan 3,4 juta barel perhari, tersisa hanya 1 juta barel perhari pada tahun 2019. Dalam konteks Indonesia munculnya berbagai perusahaan Negara seperti PT Agrinas Palma Nusantara yang tiba-tiba menjadi raja sawit, Perminas di bidang pertambangan dan Koperas Desa Merah putih akan membuat ekosistem pasar berubah. Dengan demikian modal luar negeri yang tadi merasa nyaman lalu timbul sentiment negative sehingga keluar. Konsekuensinya dollar naik terhadap rupiah.

Melihat kondisi ini, ternyata penegakan hukum bagi pelanggaran hukum perusahaan-perusahaan swasta dengan tindakan mengakuisisi merupakan hal yang berdiri pada dua dimensi yang berbeda. Pemerintahan Prabowo tegakkan hukum sekaligus mengambil lahan sawit maupun tambang yang dianggap illegal. Oleh karenanya niat Pak Prabowo di satu sisi bisa jadi baik, di sisi lain menimbulkan gejolak pasar, sehingga membuat investor melihat dan menunggu apa yang akan terjadi setelah penguasaan berbagai usaha oleh Negara.

Sekarang pertanyaanya apakah kapitalisme negara lebih baik dari kapitalisme pasar? Dengan melihat studi kasus di Negara-negara seperti Jepang dan Korea, memang Negara mempunyai andil terhadap perusahaan-perusahaan swasta, setelah kuat dilepas lagi kepada pengelolaan swasta. Sekarang apakah itu akan dilakukan oleh Pak Prabowo? Bagaimana pun juga dengan penguasaan pada aset-aset penting usaha dapat dikendalikan oleh Negara (penguasa).

Jikalau usaha-usaha yang dikuasai oleh Negara setia pada penguasa dan tidak setia pada pasar, maka usaha-usaha itu akan menjadi beban. Persoalannya saat ini kemana harus loyal, apakah kepada pasar atau penguasa? Terdengar indah memang, bahwa Negara menguasai dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tetapi pada konteks Indonesia dengan kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme apakah bisa berlaku demikian?